

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis website (EPPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil uraian peneliti berupa wawancara peneliti dengan informan, hasil observasi dan data dokumentasi yang ditemukan, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori implementasi George C. Edwards III, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Implementasi Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis website (EPPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan temuan peneliti di atas, yang telah dianalisis menggunakan teori implementasi Edwards III dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, dalam hal komunikasi, meskipun terdapat upaya untuk menjaga koordinasi antar bagian, masih terjadi kesenjangan dalam transmisi informasi. Beberapa bagian, seperti keuangan, tidak selalu mengirimkan data yang diperlukan untuk dipublikasikan di website E-PPID, yang mengakibatkan informasi yang tersedia di website tidak lengkap dan tidak selalu diperbarui dengan tepat waktu. Hal ini mengarah pada kurangnya konsistensi dalam penyampaian kebijakan dan informasi kepada publik, yang sangat penting dalam mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, terkait dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, terbukti menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini.

Kebutuhan akan jumlah staf yang cukup untuk mengelola informasi di website tidak sebanding dengan jumlah staf yang tersedia, yang berjumlah lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Selain itu, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk PPID menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Tanpa sumber daya yang memadai, baik dari sisi tenaga kerja maupun dana, kebijakan ini sulit diimplementasikan dengan efektif.

Ketiga, dalam hal disposisi, meskipun sebagian besar pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang baik, kurangnya pemahaman mendalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan serta minimnya insentif bagi staf menjadi hambatan dalam meningkatkan motivasi kerja. Tanpa adanya penghargaan atau insentif yang jelas, pelaksana kebijakan mungkin tidak dapat bekerja secara maksimal, meskipun mereka memiliki disposisi yang positif terhadap tugas mereka.

Keempat, terkait dengan struktur birokrasi, meskipun ada pembagian kewenangan yang jelas antara bagian teknis, pengelolaan data, dan pelayanan informasi, masih ada beberapa kekurangan dalam koordinasi antar bagian. Hal ini, ditambah dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran, menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Struktur yang ada belum cukup optimal dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan, meskipun sudah cukup terorganisir dalam pembagian tugas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis website (EPPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan proses implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis website (EPPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. ini. Saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan komunikasi antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan E-PPID, khususnya antara tim teknis, bagian keuangan, dan pengelola data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi rutin, memperjelas alur komunikasi, dan memastikan bahwa setiap bagian memahami pentingnya keterbukaan informasi publik yang tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, setiap bagian dapat lebih konsisten dalam menyampaikan informasi yang diperlukan untuk dipublikasikan di website.
2. Agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan lebih efektif, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mengingat keterbatasan jumlah staf, KPU Kabupaten Kerinci perlu mempertimbangkan penambahan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan pengelolaan data publik. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf yang

terlibat dalam pengelolaan E-PPID sangat penting agar mereka lebih memahami secara mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam memastikan kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

3. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengajuan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah atau pusat untuk mendukung operasional PPID, seperti untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan bagi staf. Dengan adanya anggaran yang memadai, KPU Kabupaten Kerinci akan dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan dan efisien.
4. Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja staf dalam menjalankan tugas pengelolaan informasi publik, pemberian insentif atau penghargaan yang lebih jelas sangat penting. Insentif ini dapat berupa tunjangan khusus bagi staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan website atau penghargaan atas pencapaian dalam pemenuhan standar keterbukaan informasi publik. Pemberian insentif dapat mendorong staf untuk bekerja lebih maksimal dan berkomitmen pada tujuan kebijakan yang diinginkan.